

Ikhtisar Webinar

Memperkuat Demokrasi di Indonesia: Konteks, Modal, Tantangan, dan Solusi



Memperkuat Demokrasi di Indonesia: Konteks, Modal, Tantangan, dan Solusi

26 Agustus 2022 | 09.30 – 11.30 WIB

Webinar Memperkuat Demokrasi di Indonesia: Konteks, Modal, Tantangan, dan Solusi dibuka oleh Jaleswari Pramodhawardani, Penasihat Senior LAB 45. *Webinar* ini menghadirkan empat pembicara, yakni: (1) Sigit Pamungkas, Senior Fellow LAB 45; (2) Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan; (3) Firman Noor, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN; dan (4) Luky Djani, Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta; serta dimoderatori oleh Bangkit Wiryawan, Peneliti LP3ES.

Jaleswari Pramodhawardani memberikan sambutan dengan menyampaikan bahwa kualitas demokrasi Indonesia terbilang baik dibanding negara lainnya, ditunjukkan dengan nilai demokrasi Indonesia memiliki kategori *flawed democracy*, peringkat ke 52, dari *Economic Intelligence Unit* (EIU) ataupun dari Freedom House yang menunjukkan peringkat ke 50. Namun demikian, sepuluh tahun terakhir ini terdapat penurunan nilai demokrasi, tidak hanya di Indonesia, tetapi secara menyeluruh di berbagai negara. Oleh karena itu, perlu dipahami konteks, modal, dan tantangan dari demokrasi yang hidup dan berkembang secara dinamis. Terlebih, Indonesia dalam kurun waktu dua tahun ke depan akan menyelenggarakan pesta rakyat demokrasi.

Sigit Pamungkas memaparkan bagaimana demokrasi diperkuat mengingat demokrasi di Indonesia akan terus ada di masa depan. Modal untuk memperkuat demokrasi yang dimiliki Indonesia antara lain adalah kepercayaan publik terhadap demokrasi, pembagian kekuasaan yang jelas pada konstitusi, tidak ada perang-konflik, dan sistem nilai inklusif. Selanjutnya, tantangan demokrasi di Indonesia mencakup tantangan institusional, struktural, kultural, dan agensi. Tantangan institusional berkuat pada tingginya biaya, penegakan hukum yang belum optimal, serta *check and balances* yang lemah. Tantangan struktural muncul dari oligarki, ketimpangan ekonomi, masih adanya praktik korupsi. Tantangan kultural ditunjukkan oleh populisme yang berlebihan, masih maraknya politik dinasti, dan deviasi nilai demokrasi. Terakhir, tantangan agensi bersumber dari lemahnya masyarakat sipil, elite yang memunggungi demokrasi, dan penguasaan media oleh politik.

Beberapa agenda dapat diinisiasi dalam memitigasi tantangan demokrasi Indonesia. Pertama, agenda penguatan institusional dilakukan, di antaranya melalui transformasi lembaga penegak hukum serta pelembagaan kekuatan penyeimbang. Kedua, agenda penguatan struktural dilakukan dengan membatasi gerak oligarki, contohnya membatasi pewarisan jumlah kekayaan atau pelarangan keterlibatan politik secara langsung. Kemudian, secara kultural agenda didorong pada peningkatan pendidikan-literasi politik dan membatasi dinasti politik. Terakhir, agenda pada aspek agensi diarahkan kepada pembuatan dana abadi untuk masyarakat sipil dan penguatan sosial media. Dari beberapa agenda yang tersebar pada empat aspek tantangan demokrasi Indonesia, setidaknya terdapat enam agenda yang diprioritaskan untuk segera dilakukan, yaitu (i) perbaikan ranah elektoral, utamanya biaya politik; (ii) penguatan penegakan hukum; (iii) memperkuat *welfare state*; (iv) memperkuat kekuatan penyeimbang di legislatif; (v) memperkuat masyarakat sipil; dan (vi) kaderisasi pemimpin bangsa.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Firman Noor. Praktik demokrasi prosedural memungkinkan oligarki hidup berdampingan dengan demokrasi. Hal tersebut terefleksikan dari komposisi anggota DPR 55% merupakan pebisnis aktif. Bahkan, beberapa anggota DPR memiliki posisi yang signifikan di perusahaan. Sistem saat ini masih menyediakan celah untuk korupsi mulai dari rekrutmen partai politik sampai pembuatan dan implementasi kebijakan. Implementasi demokrasi saat ini justru menimbulkan paradoks dalam mendorong praktik korupsi, yakni dengan tingginya biaya berpolitik. Dampak demokrasi pada ekonomi lebih kepada pengeluaran negara menguntungkan pemodal, bukan masyarakat tingkat rendah.

Partai politik sebagai kendaraan politik menjadi episentrum permasalahan demokrasi Indonesia karena kurang terlembaga dengan baik dan cenderung mendahulukan figur dibanding aturan main. Terlembaganya partai politik ditunjukkan oleh implementasi aturan main yang konsisten. Apabila sekolah demokrasi sudah mengedepankan idealisme dan aturan main dalam berdemokrasi, maka kader-kader yang lahir akan lebih memiliki integritas. Selanjutnya, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat karena demokrasi dapat berjalan apabila kemakmuran dan kecerdasan antara yang diperintah dan yang memerintah memiliki kapasitas yang serupa.

Kondisi saat ini sangat menyuburkan perkembangan oligarki di mana kesenjangan politik-ekonomi cukup tinggi menggerus idealisme politik.

Sementara itu, Luky Djani memaparkan bahwa solusi demokrasi tidak hanya bisa dirumuskan secara masing-masing, namun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan oligarki. Demokrasi selalu berkembang pasang-surut yang merupakan karakteristiknya yang unik. Regresi demokrasi disebabkan oleh kesenjangan yang menjadi permanen, kesenjangan yang berkaitan dengan ras tertentu, menguatnya sentimen kanan yang dibalut dengan agama, oligarki, dan *post-clientelism*. Janji modernisasi yang tidak terpenuhi akibat sistem ekonomi yang kapitalis membuat populisme berkembang sebagai alternatif kalangan akar rumput dalam memiliki *privilege* guna bernegosiasi dengan kelompok elite.

Demokratisasi membuka ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Ruang publik yang tersedia sudah diokupasi kelompok dominan sehingga suara masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah terpinggirkan. Dampak dari terpinggirkannya suara masyarakat menghasilkan pemberontakan dan perilaku apatis masyarakat dalam melihat penurunan demokrasi di Indonesia. Solusi dari permasalahan ini adalah perlu dihadirkan secara bersama, baik masyarakat ataupun para elite, untuk berdialog bagaimana menyelesaikan masalah dan memitigasi *arab winter*.

Terakhir, Yulistinus Prastowo menjelaskan bahwa kehidupan publik berasal dari tiga hal, yakni kebebasan individu, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, terdapat irisan antara kehidupan demokrasi dan ekonomi. Terdapat kerangka pikir antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melakukan dialektika guna mencapai tujuan negara, baik dalam hal politik ataupun ekonomi. Dalam hal ini, pajak diusung sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi dan pencapaian tujuan negara demokrasi. APBN menjadi penting dalam menciptakan *welfare state* pemenuhan kebutuhan dasar, utamanya pada masa pandemi COVID-19. Pajak melakukan redistribusi dengan mengambil cukup banyak dari yang kaya dan mengambil sedikit dari yang miskin. Terlebih, pajak lebih baik daripada ekstraksi sumber daya alam. Oleh karena itu, pajak memastikan inklusifitas terjadi yang direfleksikan dari belanja yang berkualitas. APBN mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pada masa pandemi COVID-19, belum pernah alokasi belanja publik yang lebih besar walaupun masih ada isu kepercayaan dalam membelanjakan uang pajak. Pajak bisa menjadi alat *state building* sehingga masyarakat dapat melakukan klaim dan kontrol atas partisipasi politik dengan contoh sukses di Afrika Tengah. Indonesia telah menerbitkan regulasi yang memungkinkan transparansi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru berjalan, telah memungkinkan penggabungan antara aktivitas dan identitas. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi. Pada intinya, pajak menjadi salah satu instrumen demokratisasi, utamanya terkait distribusi kekayaan melalui APBN.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Bagaimana pandangan pembicara terkait pembatasan oligarki pada spektrum politik dilakukan melalui peningkatan bantuan keuangan partai politik?

Sigit Pamungkas: Riset ini merekomendasikan peningkatan bantuan keuangan partai politik idealnya sebesar Rp8000-Rp16.000/suara. Pemenuhan tersebut dapat menyelesaikan misteri dari tingginya kebutuhan dana operasional partai yang tiba-tiba terpenuhi. Partisipasi anggota politik sempat memiliki masa ideal dengan diselenggarakannya pendanaan gotong royong oleh PDIP pada tahun 1999.

Pertanyaan: Upaya konkret dalam membatasi oligarki, apakah seperti yang dilakukan oleh Ukraina yang membatasi partisipasi politik jika memiliki kekayaan minimal Rp1,3 triliun?

Yulistinus Prastowo: Mengingat Indonesia tidak dapat mengambil alih kekayaan individu, namun dapat membuat rambu-rambu. Pelaporan pajak menjadi instrumen utama dengan membayar seluruh kewajiban dari yang dilaporkan. Kemudian, integrasi pelaporan keuangan dilakukan sehingga calon pejabat publik/kandidat pemilu transparan dan akuntabel. Secara kelembagaan, transparansi partai politik berjalan beriringan dari bagaimana kebutuhan partai terpenuhi. Walaupun belum dapat dipenuhi, sudah menjadi agenda bagi pemerintah. Terakhir, mendorong akuntabilitas dan transparansi dari sisi belanja, utamanya daerah. Kepala daerah masih belum dapat diawasi dan dikontrol secara optimal dalam penggunaan APBD.

Luky Djani: Setuju terhadap pembatasan kekuatan pendanaan oligarki pada ranah politik. Ada dua karakteristik dari praktik demokrasi prosedural, negara sebagai arena perebutan sumber daya oleh elite dan jenis pengeluaran partai politik yang tidak dapat terdata.

Firman Noor: oligarki cukup lincah dan adaptif, contohnya pasca-turunnya Orba pada bulan Mei sudah memiliki media baru untuk dapat masuk dalam perumusan kebijakan pada bulan Agustus. Konsep regulasi anti-oligarki yang dikeluarkan oleh Ukraina lainnya adalah dampak signifikan di media dan memiliki kemampuan monopoli ekonomi. Ironisnya di Indonesia, daerah yang memiliki sumber daya yang kaya dimonopoli dan bermain di politik, sehingga makna kedaulatan rakyat tereduksi dan tingkat kesejahteraan rakyat tidak bergerak signifikan. Perlawanan terhadap oligarki perlu dilakukan penguatan terhadap masyarakat sipil, baik dari regulasi dan pendanaan.

Pertanyaan: Dalam mengatasi *vote buying*, apakah perlu kembali ke sistem proporsional tertutup?

Sigit Pamungkas: Dengan sistem proporsional terbuka memang potensi *vote buying* tinggi. Penting mendayagunakan peran partai, karena pemilih dalam praktiknya ada yang hanya memilih partai. Oleh karena itu, alternatifnya menggabungkan antara peran partai dan sistem suara terbanyak. Modifikasi yang dilakukan apabila tidak mencapai angka tertentu dalam pemilihan partai maka penentuan calon ditentukan oleh partai yang meminimalisir persaingan individu calon kandidat dan menekankan pemilihan partai.

Luky Djani: Apapun sistem pemilihannya terdapat kelemahan yang akan dieksploitasi, sehingga yang diperlukan adalah penguatan representasi dibandingkan pemilihan sistem yang ideal. Hal tersebut mengingat politik tidak steril karena telah menjadi kebiasaan praktik berpolitik tidak sehat.

Firman Noor: Apabila akar-akar tidak diperbaiki maka sistem apapun tidak akan berubah. Isu utama terkait model demokrasi elitis adalah kebijakan dibuat oleh *crème de la crème* elite, sehingga jika sistem tertutup yang dipilih justru mempercepat konsolidasi elite alih-alih pendekatan terhadap masyarakat.

Pertanyaan: Bagaimana pendapat terkait persepsi publik terhadap pajak masih rendah, di mana masih ada kelompok kaya kebal pajak, serta klaim penarikan pajak yang tinggi namun masih terbilang rendah dibanding *welfare state*?

Yulistinus Prastowo: Terkait pengelakan pajak, negara maju justru yang cukup banyak pelakunya. Indonesia sudah memiliki arah kebijakan, salah satunya pemberlakuan *tax amnesty*. Dari pelaksanaan *tax amnesty*, justru lebih banyak yang membayar pajak daripada yang tidak berpartisipasi. Transparansi perpajakan akan diperkuat dengan menyusun *core tax system* yang mengintegrasikan semua layanan berkaitan dengan perpajakan. Adapun yang masih lemah adalah partisipasi publik. Penting bagi publik untuk terus mengawasi proses agar tidak terbajak kepentingan elite. Perlu ada instrumen dalam menyelaraskan desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Jumat, 26 Agustus
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id